



**PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi KM. 12 Sukatani-Purwakarta 41167

RENCANA KERJA ***TAHUN 2025***



KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 ini merupakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menjadi dokumen acuan bagi Kecamatan Sukatani dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen ini berisi indikator kinerja, program dan kegiatan, target capaian kinerja renstra, realisasi target kinerja program dan kegiatan, target kinerja renja serta indikator kinerja program.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Tahun 2025 dapat terwujud. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah atas setiap usaha kita bersama.

Sukatani, 10 Juli 2024

CAMAT SUKATANI,



AKIM MUSTOPA, S.Sos., KP
NIP. 19671029 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sukatani	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Sukatani.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.....	50
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	51
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	59
BAB V : PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Target Dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran.....	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)	15
Tabel 2.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 2.4	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	23
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta	30
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Purwakarta	37
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta	42
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	51
Tabel 3.2	Rencana Program,Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025...	52
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.....	55
Tabel 4.1	<i>Rumusan Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja Dan Pagu Indikatif Tahun 2025</i>	63
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2025
2. Surat Keputusan Camat Sukatani Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Rencana pembangunan Kecamatan Sukatani dimaksud diawali dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk pembangunan 3 (Tiga) tahun kedepan (2024-2026) dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Sukatani untuk pembangunan tahunan.

Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mempedomani dokumen Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukatani Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja tahunan (RENJA) selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sukatani Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Sedangkan Renja merupakan penjabaran pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Tahun 2025 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan pada masing-masing perangkat kecamatan, yang disesuaikan dengan kemampuan riil anggaran keuangan setiap program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintahan Kecamatan Sukatani dan regulasi kebijakan pimpinan yang harus dilaksanakan.

Selain itu Renja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2025 ini difokuskan pada Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu **Visi : “ PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”** dengan **Misi : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat “** , mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel di wilayah kecamatan, meningkatnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja kecamatan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat, meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
4. Penyusunan Rancangan Renja;
5. Pelaksanaan Musrenbang;
6. Penyempurnaan Penyusunan Renja ; dan
7. Penetapan Rencana Kerja (Renja).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah untuk :

1. Agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
2. Sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Sukatani Tahun 2024-2026 ke dalam rencana operasional;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Kecamatan Sukatani berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;
5. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program Kecamatan Sukatani;
6. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
7. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
8. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Rencana Kerja Kecamatan Sukatani dengan RPD Kabupaten Purwakarta;
9. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani, dan penyusunan laporan lainnya;

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

5. BAB V TUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sukatani

Kecamatan Sukatani telah mengevaluasi kinerja tahun 2023, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023.

Kinerja Kecamatan Sukatani tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2023 anggaran murni mempunyai 4 Program, 9 kegiatan dan 25 Subkegiatan dengan jumlah anggaran murni sebesar **Rp. 4.091.535.575,-** dan dana sebesar itu diarahkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.239.474.271,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 852.061.304,-. Dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum mencapai target hanya terserap **91,11%** dan ini sangat berpengaruh pada capaian kerja Kecamatan Sukatani Tahun Anggaran 2023.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat dilihat pada table 2.1 di bawah ini:

Tabel. 2.1

EVALUASI TARGET DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SUKATANI

Kode					Uraian Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Sumber Dana APBD Kabupaten Purwakarta, APBD Provinsi
7					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	01				KECAMATAN	4.091.535.575	3.727.830.677	91,11	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.969.702.975	3.626.468.677	91,35	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	5.920.000	59,20	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.251.110.071	2.992.258.134	92,04	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.519.448	128.786.500	85,00	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.509.700	88.320.000	99,79	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.175.456	292.495.843	72,59	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.388.300	118.688.200	85,15	APBD Kab. Purwakarta
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.347.000	36.507.000	65,96	

7	01	02	2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	55.347.000	36.507.000	65,96	APBD Kab. Purwakarta
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.600.000	50.980.000	96,92	
7	01	05	2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.600.000	50.980.000	96,92	APBD Kab. Purwakarta
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.885.600	13.875.000	100,00	
7	01	06	2,01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.885.600	13.875.000	100,00	APBD Kab. Purwakarta

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sukatani berdasarkan Renstra 2024-2026 adalah sebagai disajikan dalam Tabel 2.2 dibawah ini:

TABEL 2.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta**

KODE	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat daerah)Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat DaerahTahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat DaerahTahu n (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) 2023		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-) 2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)2024					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Capaian Sakip Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	B	BB	B	100%	BB	BB	BB	BB	100%
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun	100%	91,78%	100%	59,20%	59,20%	100%	250,98%		100%	
7	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daearah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95,96%	2 Dokumen	7 Dokumen		100%	
7	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen		100%	
7	01	01	2.01.03	Koordinasi Dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen		100%	
7	01	01	2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen		100%	
7	01	01	2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen		100%	

7	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	01	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun								
7	01	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan/1 Laporan	42 Bulan	100%
7	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	-	1 Laporan	4 Laporan	100%
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun								
7	01	01	2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan								
7	01	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	100%
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan								
7	01	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Item	15 Item	15 Item	15 Item	99,47%	1 Paket	3 paket	100%

7	01	01	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	27 item	22 item	27 item	27 item	100%	1 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	31 item/Dus	30 item 660 Dus	31 item/Dus	30 item/Dus	80,66%	1 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 item	4 item/lembar	5 item	5 item	100%	1 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 OH	85 OH	44 OH	40 OH	69,88%	1 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	01	2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di butuhkan								
7	01	01	2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 item	-	3 item	3 item	100%	1 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 unit	5 item	6 unit	6 unit	100%	8 Unit	19 Unit	100%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibutuhkan								
7	01	01	2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan/bulan	385 Lembar	12 laporan/bulan	11 laporan/bulan	85%	12 Laporan/Bulan	35 Laporan/Bulan	100%
7	01	01	2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan/Bulan	36 Bulan	100%
7	01	01	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 Bulan/9 Orang	9 Orang	14 Bulan	13 Bulan	88,86%	12 Laporan/Bulan	36 Laporan/Bulan	100%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan								
7	01	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	9 Unit	4 Unit	9 Unit	6 Unit	78,41%	3 Unit	13 Unit	100%

				perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	perijinannya								
7	01	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15 unit	9 Item	15 unit	12 unit	81,80%	12 Unit	33 item	100%
7	01	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	7 item	100%
7	01	01	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunannya yang dipelihara	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Baik) 93%	(Baik) 82,64%	(Baik) 93%	(Baik) 83,64%	83,76%	(Baik) 100%	(Baik) 266,28%	(Baik) 100%
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan								
7	01	02	2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	7 Kegiatan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan						1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	02	2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan						1 Dokumen		

				Daerah									
7	01	05	2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	100%	70,79%	100%	96,92%	96,92%	100%	267,71%	100%
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	100%	99,31%	100%	100%	100%	100%	299,31%	100%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun	-	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7	01	06	2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	06	2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan pembangunan Desa	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	01	06	2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	98%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	01	06	2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	04		KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian konflik sosial	-	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	04	2.01	Koordinasi Laporan	Jumlah Koordinasi Laporan	-	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%

				Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun								
7	01	04	2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical diwilayah kecamatan	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	04	2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari Hasil Evaluasi diatas, diperoleh data bahwa terdapat 2 indikator program untuk tahun 2023, sedangkan jumlah indikator dari tahun 2019- 2023 sebanyak 7 indikator. Sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3 Rata-rata Capaian Kinerja pada tahun 2023 adalah 92,86% kategori Sangat Tinggi, dan Rata- Rata Capaian Anggaran Sampai Dengan Tahun 2023 adalah : 91,11% kategori : SANGAT TINGGI.

Tabel 2.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

	INTERVAL NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	< 50 %	SANGAT RENDAH
2	51 < 65 %	RENDAH
3	66 < 75 %	SEDANG
4	76 < 90 %	TINGGI
5	91 < 100 %	SANGAT TINGGI
6	> 100	MELAMPAUI

Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Kecamatan Sukatani Tahun 2023 Triwulan 1 s/d Triwulan IV terhadap Capaian Kinerja RPJMD adalah sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi (PARSIAL 4)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Predikat Kinerja
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = (11/9 x 100)	17 = (12/10 x 100)	18
Kecamatan Sukatani				4,091,535,575		774,545,204		1,956,994,272		2,958,859,322		3,727,830,677		3,727,830,677	92.86	91.11	
Kecamatan				4,091,535,575		774,545,204		1,956,994,272		2,958,859,322		3,727,830,677		3,727,830,677	92.86	91.11	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3,969,702,975		764,355,204		1,927,884,272		2,876,074,322		3,626,468,677		3,626,468,677		91,35	
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		B		B		B		B		B		100.00		SANGAT TINGGI
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100.00		24,31		49		73,18		80,00		80,00		100.00		TINGGI
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	55,347,000	Baik	0	Baik	15,440,000	Baik	21,430,000	Baik	36,507,000	Baik	36,507,000	100,00	65,96	TINGGI
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100.00	0	0.00	0	20.00	0	40.00	0	60.00	0	60.00	0	0.00	0	SANGAT RENDAH
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	100.00	0	0.00	0	20.00	0	40.00	0	60.00	0	60.00	0	0.00	0	SANGAT RENDAH

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	100.00	0	0.00	0	5,3	3,480,000	72.21	47,480,000	80.00	50,980,000	80.00	50,980,000	100.00	96,92	SANGAT TINGGI
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100.00	19,435,600	9,5	10,190,000	9,5	10,190,000	51.00	13,875,000	51.00	13,875,000	51.00	13,875,000	100.00	99.31	SANGAT TINGGI

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukatani

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari Kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oeh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan usaha Milik Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Sukatani memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

- **Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya (trantib).
2. Peningkatan dan pewujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW.
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau instansi terkait.
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa.
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT kemerdekaan RI, karnaval umum, PAM lebaran.
7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se-Kecamatan Sukatani.
8. Pembinaan aparat Kecamatan dan perangkat desa secara rutin.
9. Pelaksanaan apel pagi setiap senin dilanjutkan Briefing Staf.
10. Mengadakan rapat koordinasi Sekretaris Desa se-Kecamatan Sukatani setiap hari Senin setelah pelaksanaan apel pagi.
11. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
12. Mengadakan rapat Koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas instansi di tingkat kecamatan.
13. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sukatani.
14. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa.

15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat perdes tentang APBDes dan susunan Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa.
16. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa.
17. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan.
18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

- **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dengan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, Dana Desa, Dana bagi hasil Pajak dan Sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayah Kecamatan Sukatani;

8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
11. Pembinaan dalam rangka P2WKSS;

- **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan.
3. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah.
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.
5. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan.
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari.
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Namun demikian, sebagai gambaran pengukuran keberhasilan pelayanan kinerja dari Kecamatan Sukatani yang tidak terlepas dari keberhasilan atas target yang hendak dicapai, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1) TW 2	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah			Opini: BB (200%)	Opini: BB	Opini : BB	Opini : BB	Opini : B	-	Opini : BB	Opini : BB	
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			100%	-	-	-	91,35%	-	-	-	
3	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Baik (93%)	Baik (94%)	Baik (94%)	Baik (94%)	Baik (83,76%)	-	-	-	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat			Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	
5	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
6	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	96,92%	-	100%	100%	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Sukatani

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan di Kecamatan Sukatani. Hal-hal kritis yang dimaksud adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan Sukatani sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain lingkup Kabupaten Purwakarta.

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang dihadapi kantor Kecamatan Sukatani Pada Tahun 2023 antara lain adalah

1. Kurangnya Sumber daya manusia dalam bidang sesuai Tupoksi;
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana OPD yang mempunyai kondisi baik untuk menunjang kegiatan-kegiatan fasilitasi dan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti IT;
4. Belum tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan penyimpanan arsip;
5. Jumlah Kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

6. Masih lemahnya Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak melaksanakan hasil koordinasi;
7. Pola Pembinaan aparat yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja;
8. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukatani, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Purwakarta.
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat di kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomis masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pelayanan Prima Kecamatan Sukatani sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum tentunya dengan tetap

mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

- 4) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- 5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, asset pertanahan dan keamanan wilayah.

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada Kecamatan Sukatani diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 antara lain:

1. Unsur Perencanaan
 - 1) Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, *outcome* yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;

- 2) Belum optimalnya pelibatan *stakeholder* nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
- 3) Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
- 4) Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- 5) Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
- 7) Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

2. Unsur Keuangan

- 1) Penggunaan aplikasi SIPD keuangan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;
- 2) Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi Asset Daerah;
- 3) Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, terutama saat terjadi pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan daerah;

3. Unsur Kepegawaian

- 1) Masih rendahnya ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment;
- 2) Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan;

5. Unsur Kewilayahan

- 1) Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kecamatan Sukatani disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat undang-undang 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Purwakarta disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2024 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Sukatani diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Dalam RKPD 2025 Kecamatan Sukatani mengusulkan 6 program dengan 16 kegiatan dan 40 subkegiatan dengan total anggaran Rp. 4.020.584.375,-.

Rancangan awal RKPD Kecamatan sukatani Tahun 2025 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program

dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel 2.6 berikut:

TABEL 2.6

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025 KEC. SUKATANI KAB.PURWAKARTA

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEC. SUKATANI				4.020.584.375					4.020.584.375	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.746.901.541	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.746.901.541	
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	31.500.000,-	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	31.500.000,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.100.674.271,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.100.674.271,-	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	5.000.000,-	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	5.000.000,-	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	36.500.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	36.500.000,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	123.017.166,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	123.017.166,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	60.500.000,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	60.500.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	277.210.104,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	277.210.104,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	112.500.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	112.500.000,-	
2.	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	138.652.176,-	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	138.652.176,-	
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	100 %	125.000.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	100 %	125.000.000,-	

	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	8.500.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	8.500.000,-	
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan	100	5.152.176,-	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan	100%	5.152.176,-	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	13.000.000,-	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	13.000.000,-	
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %	8.000.000,-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Indek Desa membangun	100 %	8.000.000,-	
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	5.000.000,-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	5.000.000,-	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	15.000.000,-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	15.000.000,-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	100 %	15.000.000,-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	100 %	15.000.000,-	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	75.000.000,-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	75.000.000,-	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100 %	75.000.000,-	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100 %	75.000.000,-	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	100 %	32.030.658,-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	100 %	32.030.658,-	
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah dokumen Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang disusun	100%	32.030.658,-	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah dokumen Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang disusun	100 %	32.030.658,-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di wilayahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Purwakarta. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem *E-Planning* yang diajukan ke Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Sukatani berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Sukatani adalah usulan untuk Program Percepatan Infrastruktur Desa. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.7

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan UMKM	Desa Sukatani	Jumlah Pengembangan UMKM	20 Unit	
2	Perbaikan jalan Kabupaten	Desa Sukatani Rw.007, 006	Jumlah Perbaikan jalan kabupaten	400 m	
3	Pembangunan Jembatan	Desa Sukatani RT. 015/004	Jumlah Pembangunan Jembatan	30 m	
4	Perbaikan drainase	Desa Sukatani Rw.02,04,09	Jumlah Perbaikan drainase	1300m	
5	Perbaikan jalan lingkungan	Desa Pasirmunjul Dusun I,II,III	Jumlah Perbaikan jalan lingkungan	2400m	
6	Perbaikan drainase	Desa Pasirmunjul Rw.03, rw.06	Jumlah Perbaikan drainase	1500m	
7	Pengembangan UMKM	Desa Pasirmunjul Dusun II	Jumlah Pengembangan UMKM	50 orang	
8	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Pasirmunjul Dusun I,II,III	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni	10 unit	
9	Perbaikan jalan desa	Desa Sukajaya Dusun 1,2,3	Jumlah Perbaikan jalan desa	7000m	
10	Pembinaan keolahragaan	Desa Sukajaya	Jumlah Pembinaan keolahragaan	1 Unit	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
11	Pelatihan Kerja	Desa Sukajaya	Jumlah Pelatihan Kerja	30 orang	
12	Pengembangan UMKM	Desa Sukajaya	Jumlah Pengembangan UMKM	50 orang	
13	Pembinaan keolahragaan	Desa Cianting Utara/Kp. Cilalawi	Jumlah Pembinaan keolahragaan	1 Unit	
14	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Desa Cianting Utara / Kp.Cilalawi Rt.02/01	Jumlah Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Unit	
15	Pelayanan kesehatan masyarakat	Desa Cianting Utara / Kp.Cilalawi Rt.02/01	Jumlah Pelayanan kesehatan masyarakat	1 Unit	
16	Pelatihan Kerja	Desa Cianting Utara / Kp. Cilalawi	Jumlah Pelatihan Kerja	50 Orang	
17	Perbaikan jalan Kabupaten	Desa Panyindangan / Kp. Cibodas	Jumlah Perbaikan jalan Kabupaten	200m	
18	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Panyindangan / Kp.Cilimus, Kp.Cilembu,Kp.Panyindangan	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni	20 Unit	
19	Pelayanan kesehatan masyarakat	Desa Panyindangan	Jumlah Pelayanan kesehatan masyarakat	1 Unit	
20	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Desa Panyindangan / Kp. Impres	Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	1 Unit	
21	Pembangunan gedung serba guna	Desa Malangnengah / Rt.012/003 dan Rt.05/02	Jumlah Pembangunan gedung serba guna		
22	Pengelolaan persampahan	Desa Malangnengah / Rt.09, Rw.03	Jumlah Pengelolaan persampahan		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
23	Pembangunan jalan desa	Desa Malangnengah / Rt.015	Jumlah Pembangunan jalan desa		
24	Perbaikan drainase	Desa Malangnengah / Depan St.KA Skt. Sampai RT.06/02	Jumlah Perbaikan drainase		
25	Pengembangan UMKM	Desa Sukamaju / Kp.Tegal Miring Rt. 05/02 Dusun I	Jumlah Pengembangan UMKM		
26	Pembangunan sarana pertanian	Desa Sukamaju / Kp. Tegal miring Rt.05,06 Rw.02	Jumlah Pembangunan sarana pertanian		
27	Pelayanan kesehatan masyarakat	Desa Sukamaju / Kp. Blok SD	Jumlah Pelayanan kesehatan masyarakat		
28	Pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan ekonomi kreatif	Desa Sukamaju / Rt.04/02	Jumlah Pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan ekonomi kreatif		
29	Perbaikan jalan Kabupaten	Desa Sindanglaya / Kp. Parakan RT.09/04	Jumlah Perbaikan jalan Kabupaten	20 Unit	
30	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Sindanglaya / Tersesebar di 6 Rw.	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni		
31	Pengembangan UMKM	Desa Sindanglaya	Jumlah Pengembangan UMKM	6 Kelompok	
32	Pengadaan alsintan	Desa Sindanglaya / Dusun I dan II	Jumlah Pengadaan alsintan	25 Orang	
33	Pelatihan Kerja	Desa Cijantung / Kp. Sindang Rt.10/03	Jumlah Pelatihan Kerja	25 Orang	
34	Perbaikan drainse	Desa Cijantung/ Kp. Sindang Rt.10/03	Jumlah Perbaikan drainse		
35	Pembinaan Kepemudaan	Desa Cijantung / Karang Taruna	Jumlah Pembinaan Kepemudaan		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
36	Pembangunan SPAM	Desa Cijantung / Karang Taruna	Jumlah Pembangunan SPAM		
37	Pengembangan UMKM	Desa Cibodas	Jumlah Pengembangan UMKM		
38	Pembangunan jalan desa	Desa Cibodas / Rw.03	Jumlah Pembangunan jalan desa		
39	Pembangunan SAB	Desa Cibodas / Rt.06, Rt.07	Jumlah Pembangunan SAB		
40	Pembangunan drainase	Desa Cibodas / Rw.01	Jumlah Pembangunan drainase		
41	Pembinaan keolahragaan	Desa Tajursindang	Jumlah Pembinaan keolahragaan		
42	Pembangunan TPT	Desa Tajursindang / Kp.Muara Rt.020/006	Jumlah Pembangunan TPT		
43	Pembangunan Posyandu	Desa Tajursindang / Rw.02,03,04,05,06	Jumlah Pembangunan Posyandu		
44	Pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan ekonomi kreatif	Desa Tajursindang	Jumlah Pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan ekonomi kreatif		
45	Perbaikan jalan Kabupaten	Desa Cipicung / Kp.Sempur Kurung Rt.01/02, Kp.Haurnunggal Rt.09/04	Jumlah Perbaikan jalan Kabupaten		
46	Peningkatan pendidikan usia dini	Desa Cipicung / Kp.Awilega Rt.02/01	Jumlah Peningkatan pendidikan usia dini	1 Kegiatan	
47	Penyediaan sarana kelembagaan masyarakat desa	Desa Cipicung / Kp.Cipicung Rt.05/02	Jumlah Penyediaan sarana kelembagaan masyarakat desa		
48	Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Desa Cipicung / Kantor Desa	Jumlah Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	
49	Pembinaan keolahragaan	Desa Cilalawi / Kp. Cipetir Rt.06/02	Jumlah Pembinaan keolahragaan		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
50	Pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan ekonomi kreatif	Desa Cilalawi / Dusun 1 dan 2	Jumlah Pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan ekonomi kreatif		
51	Pengembangan UMKM	Desa Cilalawi / Dusun 1 dan 2	Jumlah Pengembangan UMKM		
52	Penyediaan sarana kelembagaan masyarakat desa	Desa Cilalawi / Dusun 1 dan 2	Jumlah Penyediaan sarana kelembagaan masyarakat desa		
53	Perbaikan jalan desa	Desa Cianting / Rw.02, Rw.07	Jumlah Perbaikan jalan desa	700m	
54	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Cianting / Rw.01 s/d Rw.08	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni	20 unit	
55	Pembnagunan Posyandu	Desa Cianting / Rw.01 s/d Rw.08	Jumlah Pembnagunan Posyandu		
56	Pelatihan Kerja	Desa Cianting	Jumlah Pelatihan Kerja		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUKATANI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029, dimana penekanan pembangunan pada tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi.

Tujuan pembangunan jangka menengah nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan jangka panjang nasional yaitu dituangkan dalam upaya pencapaian Visi dan 8 Misi (agenda) jangka Panjang pembangunan 2045, yakni:

Visi Indonesia Emas 2045 yaitu :

“NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

8 Misi (Agenda) Pembangunan 2025-2045 yaitu :

Transformasi Indonesia

Misi (Agenda) 1 : **Transformasi Sosial;**

untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.

Misi (Agenda) 2 : **Transformasi Ekonomi;**

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industry manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic dan konektifitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Misi (Agenda) 3 : **Transformasi Tata Kelola;**

untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas,serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat.

Landasan Transformasi

Misi (Agenda) 4 : **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi;**

Dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik,hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi di tingkat global.

Misi (Agenda) 5 : **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga berkelanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

Kerangka Implementasi Transformasi

Misi (Agenda) 6 : **Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan;**

diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi, sosial, ekonomi, dan tata Kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Misi (Agenda) 7 : **Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;**

menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

Misi (Agenda) 8 : **Kesinambungan Pembangunan;**

Yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

17 Arah (Tujuan) Pembangunan 2025-2045 yaitu:

I. Transformasi Sosial;

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif

II. Tranformasi Ekonomi;

4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestic dan global
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

III. Transformasi Tata Kelola;

9. Iregulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berinteritas,tangkas dan kolaboratif

IV. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi;

10. Hukum berkeadilan, ketahanan berdaya gentar kawasan, keamanan nasional Tangguh, dan demokrasi ekonomi substansial
11. Stabilitas ekonomi makro
12. Ketangguhan diplomasi

V. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat
15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air dan menanditian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Adapun Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2025-2045 terdiri dari :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;

2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Kepeimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SUKATANI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi RENSTRA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dimana Visi Pembangunan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yaitu:

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Sukatani akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukatani. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta memiliki misi yaitu:

MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026**

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"			
MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi
Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pengampu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk menunjang tujuan dan sasaran tersebut diatas, Kecamatan Sukatani mengusulkan 6 (Enam) program dan 16 (Enam belas) kegiatan serta 40 (Empat puluh) subkegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025. Program, kegiatan dan Subkegiatan tersebut adalah :

Tabel 3.2

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan	No.	Subkegiatan		
1	2	3	4	5	6		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	1	Penyusunan Dokumen perencanaan daerah		
					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					4	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	
					5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
			4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11
							12

		5	Administrasi Umum Perangkat daerah	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
				14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				17	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
				18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Pengadaan Mebel
				20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
				24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
				26	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
				28	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
		10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		11	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	31	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
III	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	32	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

			Daerah		Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	33	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				34	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				35	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				36	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa
		15	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan	38	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
VII	PROGRAM KOORDINASI KETERNTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16	Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	39	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				40	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
KECAMATAN SUKATANI					4.020.584.375				4.116.063.109	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kec. Sukatani	BB	3.746.901.541	APBD		BB	3.990.030.920
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec. Sukatani	100%	31.500.000,-	APBD		100%	27.500.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Kec. Sukatani	100%	3.100.674.271,-	APBD		100%	3.375.462.720

3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun	Kec. Sukatani	100%	5.000.000	APBD		100%	5.500.000
4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	Kec. Sukatani	100%	36.500.000	APBD		100%	30.000.000
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	123.017.166	APBD		100%	113.050.000
6	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di butuhkan	Kec. Sukatani	100%	60.500.000			100%	47.000.000
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Penvediaan Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dibutuhkan	Kec. Sukatani	100%	277.210.104	APBD		100%	295.518.200
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	112.500.000	APBD		100%	96.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Sukatani	100%	138.652.176	APBD		100%	23.600.001
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penvelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	125.000.000	APBD		100%	15.000.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Jumlah Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan vama tidak dilaksanakan oleh Unit Keria Perangkat Daerah yang ada di	Kec. Sukatani	100%	8.500.000	APBD		100%	8.600.000

		Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan yang dilaksanakan							
	3	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Sukatani	100%	5.152.176,-	APBD		100%	1,-
III		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Fasilitas. Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	75.000.000	APBD		100%	55.330.000
	1	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sukatani	100%	75.000.000	APBD		100%	55.330.000
IV		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	13.000.000	APBD		100%	11.000.000
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun	Kec. Sukatani	100%	8.000.000	APBD		100%	6.000.000
	2	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	5.000.000	APBD		100%	5.000.000
V		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kec. Sukatani	100%	15.000.000	APBD		100%	9.000.000

	1	Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	Kec. Sukatani	100%	15.000.000	APBD		100%	9.000.000
VI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	32.030.658	APBD		100%	27.102.188
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun	Kec. Sukatani	100%	32.030.658	APBD		100%	27.102.188

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKATANI

1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sukatani Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana kerja tahun 2025, Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sukatani tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2025 sebesar **Rp 4.020.584.375-**, yang terdiri dari **Rp 3.094.474.271,-** untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan **Rp. 926.110.104.-** untuk belanja Program dan Kegiatan, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sukatani Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Kegiatan : **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah-** sebesar **Rp. 31.500.000,-** dengan indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun, dengan target terealisasi 100 %;
2. Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah-**sebesar **Rp. 3.100.674.271,-** dengan indicator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun, dengan target terealisasi 90 %;
3. Kegiatan : **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** – sebesar **Rp. 5.000.000,-** dengan indicator : Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun, dengan target terealisasi 100%.

4. Kegiatan : **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** – sebesar **Rp. 36.500.000,-** dengan indicator : Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan, dengan target terealisasi 100%
 5. Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat daerah-** sebesar **Rp. 123.017.166,-** dengan indikator Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admisnistrasi Umum yang disediakan, target terealisasi : 100 %;
 6. Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebesar **Rp. 60.500.000,-** dengan indicator : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang dibutuhkan, dengan target terealisasi 100%.
 7. Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah-sebesar Rp. 277.210.104,-** dengan indicator Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan, target terealisasi 100 %;
 8. Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- sebesar Rp. 112.500.000,-** dengan indicator Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan, target dapat terealisasi 100 %;
- Total Rencana Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 3.746.901.541,-**

II. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan : **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan** sebesar **Rp. 125.000.000,-** dengan indicator jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan, target dapat terealisasi 100%.
2. Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** sebesar **Rp. 8.500.000,-** dengan indicator : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan, dengan target terealisasi 100%.

3. Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum sebesar Rp. 5.152.176,- dengan indicator : Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan, dengan target terealisasi 100%

Total Rencana Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, sebesar Rp. 138.652.176,-.

III. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sebesar **Rp. 75.000.000,-** dengan indicator Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah, dengan target terealisasi 100%

Total Rencana Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, sebesar Rp. 75.000.000,-.

IV. Program : Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;

1. Kegiatan : **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa- sebesar Rp. 8.000.000,-** dengan indicator Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan ,target terealisasi 100 %;
2. Kegiatan : **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan,** sebesar **Rp. 5.000.000,-** dengan indicator jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan, dengan target terealisasi 100%

Total Rencana Keuangan Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, Rp. 13.000.000,-.

V. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan : **Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum,** sebesar **Rp. 15.000.000,-** dengan indicator Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang disusun, dengan target terealisasi 100%.

Total Rencana Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebesar Rp. 15.000.000,-.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

1. Kegiatan : **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 32.030.658,-** dengan indicator Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun, target terealisasi 100%.

Total Rencana Keuangan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 32.030.658,-

TABEL.4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				KETERANGAN	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kecamatan						4.020.584.375	APBD		
7	01	01		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Sukatani	BB	3.746.901.541	APBD
				Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec.Sukatani	7	31.500.000	APBD
7	01	01	2.01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD
7	01	01	2.01.02	2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kec.Sukatani	1	4.500.000	APBD
7	01	01	2.01.03	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Kec.Sukatani	1	3.500.000	APBD
7	01	01	2.01.04	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Sukatani	1	4.500.000	APBD
7	01	01	2.01.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec.Sukatani	1	3.500.000	APBD
7	01	01	2.01.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD

7	01	01	2.01.07	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sukatani	1	5.500.000	APBD	
7	01	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Kec.Sukatani	2	3.100.674.271	APBD	
7	01	01	2.02.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sukatani	20	3.094.474.271	APBD	
7	01	01	2.02.03	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Sukatani	1	6.200.000	APBD	
7	01	01	2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD	
7	01	01	2.03.05	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD	
7	01	01	2.05	Kegiatan : Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	Kec.Sukatani	2	36.500.000	APBD	
7	01	01	2.05.02	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Sukatani	1	16.500.000	APBD	
7	01	01	2.05.09	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kec.Sukatani	1	20.000.000	APBD	
7	01	01	2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah		Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admisnistrasi Umum yang disediakan	Kec.Sukatani	5	123.166.167	APBD	
7	01	01	2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Sukatani	1	15.550.000	APBD	
7	01	01	2.06.02	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Sukatani	1	13.000.000	APBD	
7	01	01	2.06.03	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Sukatani	1	59.467.166	APBD	
7	01	01	2.06.04	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Sukatani	1	12.500.000	APBD	
7	01	01	2.06.05	5	Penyelenggaraan rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sukatani	1	12.500.000	APBD	
7	01	01	2.06.06	6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec.Sukatani	1	10.000.000	APBD	

7	01	01	2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di butuhkan	Kec.Sukatani	4	60.500.000	APBD	
7	01	01	2.07.01	1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kec.Sukatani	1	25.000.000	APBD	
7	01	01	2.07.02	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kec.Sukatani	3	35.500.000	APBD	
7	01	01	2.07.03	3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec.Sukatani	1	0	APBD	
7	01	01	2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan	Kec.Sukatani	3	277.210.104	APBD	
7	01	01	2.08.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Sukatani	12	13.000.000	APBD	
7	01	01	2.08.02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Sukatani	12	43.100.000	APBD	
7	01	01	2.08.03	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Sukatani	12	221.110.104	APBD	
7	01	01	2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	Kec.Sukatani	4	112.500.000	APBD	
7	01	01	2.09.02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Sukatani	2	15.500.000	APBD	
7	01	01	2.09.03	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Sukatani	12	18.000.000	APBD	
7	01	01	2.09.04	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Sukatani	3	54.000.000	APBD	
7	01	01	2.09.05	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Sukatani	2	25.000.000	APBD	
7	01	02		Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Sukatani	2	138.652.176	APBD	
7	01	02	2.01	Kegiatan :Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kec.Sukatani	1	125.000.000	APBD	

7	01	02	2.01.02	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Sukatani	1	125.000.000	APBD	
7	01	02	2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan	Kec.Sukatani	1	8.500.000	APBD	
7	01	02	2.02.03	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sukatani	1	8.500.000	APBD	
7	01	02	2.03	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Sukatani	1	5.152.176	APBD	
7	01	02	2.03.02	1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec.Sukatani	1	5.152.176	APBD	
7	01	03		Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Kec.Sukatani	1	13.000.000	APBD	
7	01	03	2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indek Desa membangun	Kec.Sukatani	1	8.000.000	APBD	
7	01	03	2.01.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Sukatani	1	8.000.000	APBD	
7	01	03	2.06	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD	
7	01	03	2.06.07	1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD	
7	01	04		Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kec.Sukatani	1	15.000.000	APBD	
7	01	04	2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	Kec.Sukatani	2	15.000.000	APBD	
7	01	04	2.01.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sukatani	1	7.000.000	APBD	

7	01	04	2.01.02	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Sukatani	1	8.000.000	APBD
7	01	05		Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec.Sukatani	1	75.000.000	APBD
7	01	05	2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	Kec.Sukatani	1	75.000.000	APBD
7	01	05	2.01.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Sukatani	200	75.000.000	APBD
7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Kec.Sukatani	2	32.030.658	APBD
7	01	06	2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang disusun	Kec.Sukatani	2	32.030.658	APBD
7	01	06	2.01.09	1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Sukatani	1	16.020.275	APBD
7	01	06	2.01.10	2	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec.Sukatani	1	6.010.383	APBD
7	01	06	2.01.16	3	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD
7	01	06	2.01.06	4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD

TABEL.4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Arah kebijakan dan Pagu Indikatif
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJP D 2005-2025	MISI RPJP D 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL												
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"												
I.		Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat										
7.01.01			Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.861.427.938	3.746.901.541	3.990.030.920	Kecamatan Sukatani
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	22.000.001	138.652.176	23.600.001	Kecamatan Sukatani
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.500.000	13.000.000	11.000.000	Kecamatan Sukatani
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.500.000	15.000.000	9.000.000	Kecamatan Sukatani
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.600.000	75.000.000	55.330.000	Kecamatan Sukatani
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.314.912	32.030.658	27.102.188	Kecamatan Sukatani

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Penyusunan RENJA kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, mengusung Tema Pembangunan yakni **“MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH”**, dengan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dokumen RENJA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Kecamatan Sukatani dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan. Oleh karena itu guna menjamin pelaksanaan RENJA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada Renstra Kecamatan Sukatani;
2. RENJA menjadi pedoman bagi Kantor Kecamatan Sukatani dalam menyusun dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Subgiatan Tahun 2025;

3. Perangkat Kecamatan Sukatani berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RENJA dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta masyarakat dan stakeholder Kecamatan Sukatani ;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA secara berkala terhadap capaian kinerja Kecamatan ;
5. RENJA menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan Sukatani seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat kepada Bupati, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan, dan penyusunan laporan lainnya.

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah Kecamatan Sukatani dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kecamatan Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

Purwakarta, 10 Juli 2024


CAMAT SUKATANI
AKIM, S.Sos.KP
NIP. 19671029 199403 1 009